

Pengaruh Intensitas Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan

Mesak Iek¹, Marsi Adi Purwadi², Ferdi Maringga³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 04, 2024
Revised October 11, 2024
Accepted October 25, 2024
Available online Nov 01, 2024

Kata Kunci:

Kinerja Pembangunan Daerah; Kesejahteraan; Kebijakan Strategis



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Cenderawasih.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan indikator pembangunan di Kabupaten Boven Digoel, memetakan isu-isu strategis pembangunan, dan menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan PDRB ADHK dari 2.193,76 miliar rupiah pada 2010 menjadi 3.218,17 miliar rupiah pada 2022, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 56,15 persen pada 2010 menjadi 62,52 persen pada 2022. Angka rata-rata lama sekolah juga meningkat signifikan dari 2,40 tahun pada 2005 menjadi 9,03 tahun pada 2022, menunjukkan peningkatan akses pendidikan. Namun, persentase penduduk miskin cenderung fluktuatif dengan tantangan lain seperti ketergantungan pada sektor pertanian, rendahnya investasi, ketimpangan pendapatan, keterbatasan infrastruktur, dan masalah kesehatan serta pendidikan. Untuk meningkatkan kinerja pembangunan, direkomendasikan strategi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi dengan memperbaiki iklim bisnis dan infrastruktur. Pengurangan biaya konstruksi, peningkatan infrastruktur transportasi, pemerataan pendapatan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola pemerintahan juga diperlukan untuk mengatasi isu-isu pembangunan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boven Digoel.

ABSTRACT

This research aims to identify the progress of development indicators in Boven Digoel District, mapping development strategic issues, and devise evidence based policy recommendations to improve the performance of section development. Research showed an increase in PDRB ADHK from 2,193.76 billion dollars in 2010 to 3,218.17 billion dollars in 2022, as well as increased human development index (IPM) from 56,15 percent in 2010 to 62,52 percent in 2022. The old school average also increased significantly from 2,40 years in 2005 to 9,03 years in 2022., shows increased access to education. However, the percentage of poor population tends to be fluctuative with other challenges such as the dependency of the agricultural sector, low investment, income inequality, infrastructure limitations, and health and education problems. To improve the development performance, recommended economic diversification strategy through the development of tourism, the processing industry, and creative economy, as well as increased investment by improving the business and infrastructure climate. Reduction in construction costs, improvement of transport infrastructure, income equity, improving the quality of education and healthcare, as well as strengthening the governance system is also necessary to address development issues and accelerate economic growth in Boven Digoel District.

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Boven Digoel terletak di Provinsi Papua Selatan dan dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang unik. Dengan luas wilayah yang mencakup daerah-daerah terpencil dan kondisi alam yang cukup berat, kabupaten ini menghadapi berbagai kesulitan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kondisi geografis yang terdiri dari hutan lebat, sungai yang berliku, serta medan yang sulit diakses, mempengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi sumber daya. Secara demografis, penduduk Boven Digoel terdiri dari berbagai suku asli Papua dengan budaya dan kearifan lokal yang kaya, namun sering kali terkendala akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Sejarah pembangunan daerah ini mencatat berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun banyak tantangan yang masih perlu diatasi. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami dinamika pembangunan di Boven Digoel guna menciptakan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua Selatan menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam upaya pembangunan daerah. Masalah utama yang dihadapi termasuk keterbatasan aksesibilitas akibat kondisi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau, yang memperlambat distribusi barang dan layanan, serta meningkatkan biaya transportasi. Selain itu, infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan masih minim dan memerlukan peningkatan yang signifikan. Keterbatasan ini berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama dalam akses terhadap pelayanan publik yang memadai. Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Boven Digoel juga turut menjadi tantangan, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi informal. Selain itu, faktor alam seperti cuaca ekstrem dan kondisi tanah yang sulit menambah kompleksitas pembangunan daerah ini. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan intervensi yang terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Boven Digoel.

Kabupaten Boven Digoel, sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan, telah mengalami berbagai upaya pembangunan melalui kebijakan, program, dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pembangunan ini, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor pertanian dan kehutanan. Namun, meskipun telah banyak program yang dicanangkan, dampaknya terhadap peningkatan kinerja pembangunan masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Tantangan geografis yang berat, keterbatasan anggaran, dan kurangnya koordinasi antarinstansi sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan program pembangunan yang ada telah memberikan dampak positif serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Boven Digoel.

Kebijakan regional memainkan peran penting dalam kinerja pembangunan daerah dengan mengatasi kesenjangan ekonomi, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, dan meningkatkan kapasitas lokal. Ini melibatkan pendekatan strategis untuk investasi dan pembangunan, disesuaikan dengan karakteristik unik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kebijakan ini sangat penting untuk mempromosikan kemakmuran sosial ekonomi dan mengurangi keterbelakangan di daerah-daerah yang kurang diuntungkan. Di bawah ini adalah aspek-aspek kunci tentang bagaimana kebijakan daerah mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Kebijakan regional bertujuan untuk memperkuat kohesi ekonomi dan sosial dengan mengurangi kesenjangan tingkat pembangunan antar daerah. Ini melibatkan tanggung jawab bersama di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Eropa dan otoritas lokal, untuk menciptakan sistem penilaian dan pemantauan yang fleksibel dan efektif (Vidoni & Stryczynski, 2023)]. Ini menargetkan daerah lemah dan kuat, menggunakan berbagai instrumen untuk mempromosikan pembangunan yang seimbang dan mengatasi ketidaksetaraan regional (Fratesi, 2023).

Implementasi kebijakan daerah yang efektif membutuhkan pemahaman dan pemanfaatan kapasitas endogen, seperti sumber daya alam dan manusia, pengembangan teknologi, dan kerangka kelembagaan. Pendekatan ini memastikan bahwa daerah dapat memanfaatkan karakteristik uniknya untuk mencapai kemajuan jangka panjang (Sabic & Vujadinović, 2017). Kebijakan pajak daerah, bila diterapkan secara efektif, dapat secara signifikan meningkatkan pendapatan pajak daerah, seperti yang ditunjukkan di Kabupaten Padang Lawas, di mana kinerja karyawan memainkan peran penting dalam keberhasilan kebijakan (Nasution, 2021).

Kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan menggabungkan ekologi industri dan logistik untuk mengelola aliran material dan energi secara efisien. Integrasi ini mendukung pengembangan kawasan eko-industri dan proyek ekonomi sirkular, yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan (Mishenin et al, 2018). Konsep modern pembangunan neo-endogen menekankan

harmonisasi tujuan ekonomi, sosial, dan ekologi, memastikan bahwa pembangunan daerah bersifat integral dan berkelanjutan (Sabic & Vujadinović, 2017). Meskipun kebijakan regional sangat penting dalam mendorong pembangunan daerah, kebijakan ini harus dapat disesuaikan dengan kondisi dan identitas spesifik masing-masing daerah. Keberhasilan kebijakan tersebut tergantung pada kolaborasi yang efektif dari kekuatan lokal dan eksternal, dan kemampuan untuk berinovasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks.

Indikator pembangunan memainkan peran penting dalam menilai kinerja pembangunan daerah kabupaten dengan menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengevaluasi berbagai dimensi pertumbuhan dan keberlanjutan. Indikator-indikator ini membantu dalam memahami dinamika sosial ekonomi dan lingkungan suatu wilayah, memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Pentingnya indikator ini digarisbawahi oleh kemampuan mereka untuk menangkap sifat multifaset pembangunan daerah, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa strategi pembangunan selaras dengan tujuan pertumbuhan berkelanjutan dan daya saing regional yang lebih luas.

Indikator ekonomi sangat penting untuk menilai kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan suatu wilayah. Mereka termasuk metrik seperti pertumbuhan PDB, tingkat lapangan kerja, dan tingkat investasi. Misalnya, studi oleh Borodin menyoroti penggunaan indikator ekonomi untuk melacak pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah Rusia, mencatat fluktuasi keberlanjutan ekonomi dari waktu ke waktu (Borodin, 2023). Kinerja inovasi kabupaten, seperti yang dibahas oleh Rapetti et al., sering diukur menggunakan indikator ekonomi yang menilai dampak inovasi terhadap pertumbuhan dan daya saing daerah (Rapetti et al, 2023). Dalam konteks daerah, indikator ekonomi digunakan untuk mengevaluasi efektivitas wilayah ini dalam meningkatkan daya saing regional dan nasional (Joo et al, 2022).

Indikator sosial menilai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah. Ini termasuk tingkat pendidikan, akses perawatan kesehatan, dan kesetaraan sosial. Penelitian Borodin menekankan pentingnya indikator sosial dalam mengevaluasi pembangunan berkelanjutan, mencatat perubahan dalam keberlanjutan sosial di berbagai wilayah (Borodin, 2023)]. Pengembangan inovasi daerah juga mempertimbangkan indikator sosial untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan ke dalam hasil sosial yang lebih baik, seperti penciptaan lapangan kerja dan pengembangan masyarakat (Rapetti et al. 2022).

Selain itu, indikator lingkungan sangat penting untuk menilai dampak ekologis pembangunan daerah. Mereka membantu dalam memantau tingkat polusi, konsumsi sumber daya, dan konservasi keanekaragaman hayati. Model Borodin untuk pembangunan berkelanjutan mencakup indikator lingkungan untuk mengevaluasi keberlanjutan ekologis daerah (Borodin, 2023). Pendekatan kartu skor seimbang yang digunakan oleh Akulov menyoroti integrasi indikator lingkungan dalam perencanaan strategis untuk memastikan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Akulov, 2023).

Sementara itu Indikator tata kelola mengukur efektivitas administrasi daerah dan implementasi kebijakan. Mereka termasuk metrik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Studi oleh Rapetti dkk. mengidentifikasi tata kelola sebagai dimensi kunci dalam menilai kinerja distrik inovasi, menekankan peran tata kelola yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan (Rapetti et al. 2023) (Rapetti et al. 2023). Indikator tata kelola juga penting dalam mengevaluasi iklim investasi suatu wilayah, karena mereka mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi (Abdulaeva et al. 2019).

Penggunaan metodologi yang tepat, seperti yang dibahas oleh Svatošová, memungkinkan penilaian komprehensif pembangunan daerah dengan menganalisis keterkaitan antara berbagai indikator (Svatošová, 2018). Upaya-upaya tersebut memberikan pendekatan sistematis untuk mengembangkan indikator kinerja melalui konsensus ahli, memastikan bahwa indikator relevan dan komprehensif (Joo et al. 2022). Sementara indikator pembangunan sangat penting untuk menilai kinerja regional, penting untuk mengenali tantangan yang terkait dengan penggunaannya. Ini termasuk potensi redundansi informasi, seperti dicatat oleh Akulov, dan kebutuhan akan indikator spesifik konteks yang mencerminkan karakteristik unik setiap wilayah (Akulov, 2023). Selain itu, sifat dinamis pembangunan daerah memerlukan pembaruan dan penyempurnaan indikator yang berkelanjutan untuk memastikan indikator tetap relevan dan efektif dalam memandu keputusan kebijakan.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Indikator-indikator ini meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, angka kemiskinan, serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Dengan menggunakan indikator tersebut, kita dapat menilai secara objektif apakah kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif atau tidak. Selain itu, indikator ini juga berguna untuk melakukan perbandingan kinerja pembangunan Kabupaten Boven Digoel dengan daerah lain di Provinsi Papua Selatan atau di tingkat nasional. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini membantu mengidentifikasi area-area

yang membutuhkan perhatian lebih dan perbaikan. Dengan demikian, indikator kinerja pembangunan tidak hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai panduan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih efektif di masa depan.

Urgensi penelitian kinerja pembangunan daerah kabupaten digaribawahi oleh kebutuhan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan penyampaian pelayanan publik. Hal ini sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan unik yang dihadapi oleh berbagai daerah. Bagian berikut mengeksplorasi berbagai aspek urgensi ini, menarik wawasan dari makalah penelitian yang disediakan. Pengembangan sistem inovasi administrasi negara, sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik meskipun ada keterbatasan anggaran dan sumber daya. Membangun unit inovasi dan memberi insentif pada penganggaran berbasis inovasi adalah strategi utama untuk mengoptimalkan tata kelola daerah dan kinerja kepemimpinan (Sartika, 2019).

Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah yang efektif sangat penting, seperti yang terlihat dalam kasus Kabupaten Kendal. Menyelaraskan rencana pembangunan dengan mandat hukum, seperti Permendagri No. 86 tahun 2017, memastikan pembangunan daerah efektif dan sehat secara hukum. Ini melibatkan penjadwalan terperinci dan dokumentasi hukum untuk menghindari masalah di masa depan dan meningkatkan efisiensi birokrasi (Latif & Widayati, 2019). Pengembangan SDM sangat penting untuk meningkatkan kinerja aparat daerah. Strategi termasuk pendidikan formal dan pelatihan, meskipun kendala anggaran membatasi peluang pelatihan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sangat penting untuk tata kelola dan pembangunan daerah yang efektif (Zainal et al. 2020).

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP) menyoroti pergeseran ke arah pengukuran kinerja yang berorientasi hasil. Mengidentifikasi kelemahan dalam perencanaan dan evaluasi kinerja sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pemerintah (Salem et al. 2021). Kinerja DPRD Kabupaten/Kota dalam merumuskan peraturan daerah masih dinilai belum optimal, dengan banyak rancangan yang masih belum selesai. Hal ini mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah dan menyoroti perlunya perbaikan proses legislatif dan alokasi sumber daya (Kuswandi et al. 2023). Penilaian kinerja daerah melalui Bappedalitbang sangat penting, tentunya dengan pemanfaatan anggaran yang efektif. Menganalisis pola pengeluaran dan efisiensi dapat mengungkapkan area untuk perbaikan, memastikan bahwa sumber daya keuangan selaras dengan prioritas pembangunan (Kamila & Andina, 2022). Sementara urgensi penelitian kinerja pembangunan daerah kabupaten terbukti sangat dibutuhkan. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Faktor-faktor seperti kearifan lokal dan warisan budaya, memainkan peran penting dalam membentuk strategi pembangunan daerah. Mengintegrasikan elemen-elemen ini ke dalam perencanaan pembangunan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan (Harjanti et al. 2020).

Urgensi penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kinerja pembangunan di Kabupaten Boven Digoel masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang memerlukan perhatian khusus. Kabupaten ini, dengan kondisi geografis yang unik dan terpencil, kerap mengalami kendala dalam pelaksanaan program pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dalam literatur yang ada, terdapat kesenjangan mengenai kajian spesifik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerah tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi nyata di lapangan, termasuk mengidentifikasi hambatan dan potensi yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, strategis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Boven Digoel ke depannya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Kinerja pembangunan daerah memainkan peran penting dalam perencanaan pembangunan, berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan pertumbuhan daerah. Ini melibatkan pendekatan sistematis untuk alokasi dan pemanfaatan sumber daya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik berkelanjutan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat, perencanaan strategis, dan integrasi pertimbangan sosial ekonomi dan lingkungan. Di bawah ini, kami mengeksplorasi aspek-aspek kunci dari kinerja pembangunan daerah dan perannya dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan daerah telah berkembang untuk menekankan keberlanjutan, mengintegrasikan teknologi informasi, dan melibatkan masyarakat lokal untuk mengatasi masalah modern seperti perubahan iklim dan inklusi sosial ("*Sustainable regional planning for rural development*", 2023). Pembangunan pedesaan yang berkelanjutan sangat penting, dengan fokus pada penyeimbangan kebijakan pembangunan dengan pengelolaan sumber daya alam. Ini termasuk mempromosikan pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, dan pertumbuhan ekonomi yang adil ("*Regional planning and rural development*", 2023).

Pergeseran dari fokus ekonomi tradisional untuk memasukkan aspek sosial dan ekologi menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan daerah (Dutt et al. 2020).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan daerah, karena meningkatkan efektivitas proses perencanaan. Modal sosial, termasuk jaringan, kepercayaan, dan kerja sama, memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat ("*Regional planning and rural development*", 2023). Keberhasilan rencana pembangunan daerah sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, yang sangat penting untuk mewujudkan potensi perencanaan tata ruang (Amir & Widyasamratri, 2021). Perencanaan partisipatif, meskipun menantang, diperlukan untuk menyelaraskan rencana tata ruang dan pembangunan, yang secara signifikan berdampak pada kinerja pembangunan daerah (Toham et al. 2021).

Perencanaan strategis sangat penting untuk mengoptimalkan lingkungan sosial ekonomi daerah. Peraturan negara memainkan peran penting dalam merasionalisasi distribusi sumber daya keuangan untuk mendukung pembangunan daerah (Bondarenko, 2021). Kerangka kerja legislatif untuk perencanaan strategis dapat menjadi penghalang, seperti yang terlihat di Rusia, di mana peraturan deskriptif menghambat skema pengembangan teritorial terpadu (Bondarenko, 2021). Strategi pembangunan daerah harus selaras dengan peraturan sosial ekonomi negara untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang efektif (Bondarenko, 2021).

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berperan penting dalam menyusun rencana pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) di Medan, Indonesia. Badan-badan ini mengoordinasikan kegiatan, mengintegrasikan inisiatif terkait, dan memberikan panduan (Joe & Syarvina, 2022). Kemampuan teknis lembaga-lembaga ini dalam menyerap aspirasi masyarakat sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang sukses. Namun, tantangan seperti intervensi politik dan keterampilan yang terbatas dapat menghambat efektivitasnya (Djafar et al. 2021). Pembangunan dan perencanaan daerah menghadapi tantangan seperti meningkatnya ketidakesetaraan, ketidakamanan ekonomi, dan ancaman global seperti perubahan iklim. Isu-isu ini memerlukan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan inovasi teknologi (Dutt et al. 2020).

Terlepas dari tantangan ini, perencanaan daerah tetap menjadi instrumen penting untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan ekonomi, menawarkan peluang untuk pekerjaan dan pengembangan masyarakat (Bakmaz et al. 2020). Sementara kinerja pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan, bukan tanpa tantangan. Efektivitas perencanaan daerah seringkali bergantung pada penyelarasan rencana strategis dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan negara. Selain itu, kapasitas lembaga perencanaan untuk menggabungkan aspirasi masyarakat dan beradaptasi dengan perubahan sosial ekonomi sangat penting. Mengatasi tantangan ini membutuhkan pendekatan kolaboratif, mengintegrasikan keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan perencanaan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan regional.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini teridentifikasinya perkembangan indikator pembangunan daerah di Kabupaten Boven Digoel sebagai upaya memperoleh informasi terkait pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kesejahteraan dan perkembangan pembangunan di Boven Digoel, terpetakannya isu-isu pembangunan strategis di kabupaten Boven Digoel sebagai input dalam merumuskan strategi pembangunan yang tepat guna mengatasi permasalahan-permasalahan Pembangunan, dan tersusunnya rekomendasi kebijakan yang konkrit dan berbasis bukti untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kabupaten Boven Digoel.

2. METODE

Jenis data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data atau sekumpulan data yang diperoleh, diliput dan dikumpulkan dari berbagai laporan yang telah dipublikasikan oleh sebuah institusi sebelumnya. Data yang dihimpun dalam studi ini diperoleh dari instansi pemerintahan seperti BPS, Bappeda, dan sebagainya. Adapun teknik utama pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini adalah studi Kepustakaan. Secara garis besar pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini terdiri atas dua bagian yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif.

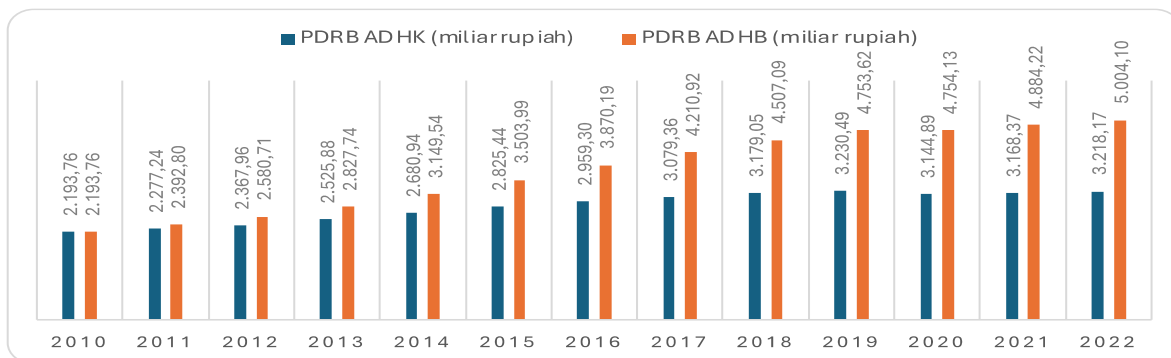
Pendekatan kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis informasi yang dapat diukur atau data yang dapat dimanipulasi misalnya dalam bentuk persamaan, tabel, grafik. Pendekatan kuantitatif dalam studi ini digunakan untuk mempelajari berbagai kecenderungan, meramalkan dampak kebijakan yang diambil dan memperkirakan persoalan-persoalan yang potensial terjadi, serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan berbagai alternatif rencana yang akan diambil. Selanjutnya pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun

metoda yang diterapkan dalam pendekatan kualitatif kali ini adalah observasi. Observasi yang dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang masalah yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Indikator Tingkat Kesejahteraan dan Perkembangan Pembangunan di Boven Digoel

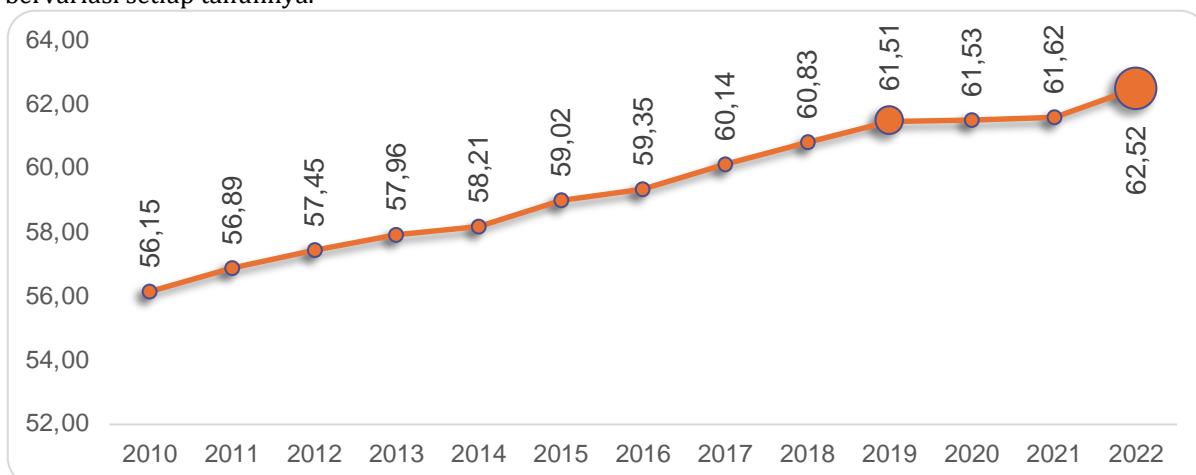
Tahun 2010, nilai PDRB ADHK tercatat sebesar 2.193,76 miliar rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 3.218,17 miliar rupiah pada tahun 2021, dan naik lebih lanjut menjadi 3.218,17 miliar rupiah di tahun 2022. Nilai PDRB ADHB, yang dimulai dari 2.193,76 miliar rupiah pada tahun 2010, juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, mencapai 4.884,22 miliar rupiah pada tahun 2021 dan meningkat lebih lanjut menjadi 5.004,10 miliar rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan yang stabil ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel sepanjang periode tersebut, meskipun dengan fluktuasi tertentu di beberapa tahun, terutama pada PDRB ADHK.



Gambar 1. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010-2022 (miliar rupiah)

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah, 2024)

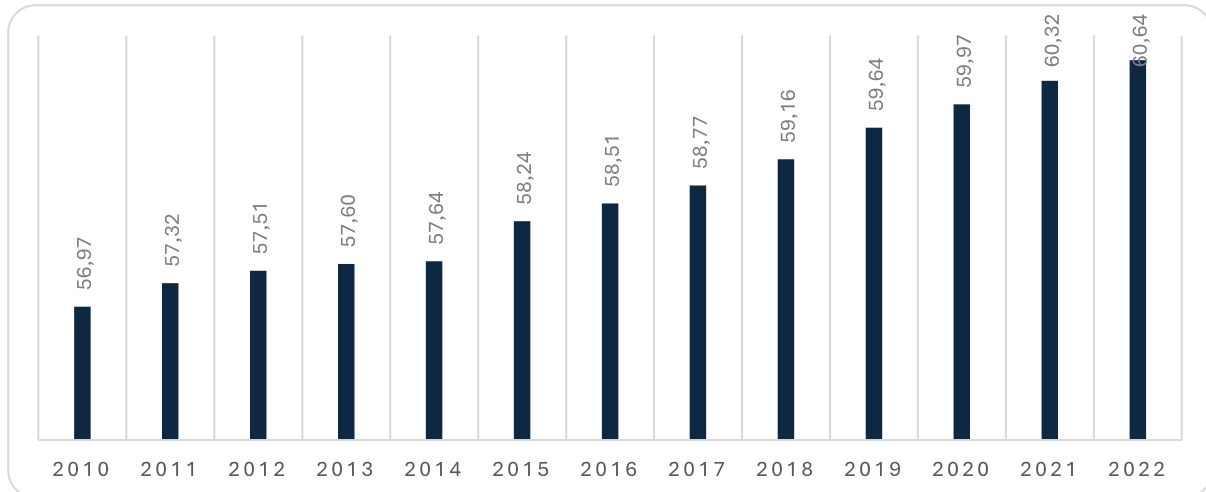
Tahun 2010, IPM tercatat sebesar 56,15 persen dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, IPM mencapai 56,89 persen, naik menjadi 57,45 persen pada tahun 2012, dan sedikit meningkat ke 57,96 persen pada tahun 2013. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2014 menjadi 58,21 persen dan 59,02 persen pada tahun 2015. Perkembangan IPM terus menunjukkan tren positif dengan nilai 59,35 persen pada tahun 2016, naik ke 60,14 persen pada tahun 2017, dan 60,83 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, IPM mencapai 61,51 persen, dan sedikit meningkat pada tahun 2020 dan 2021 dengan nilai masing-masing 61,53 persen dan 61,62 persen. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Boven Digoel mencapai 62,52 persen, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Peningkatan IPM ini menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia di Kabupaten Boven Digoel, meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi setiap tahunnya.



Gambar 2. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2021 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah, 2024)

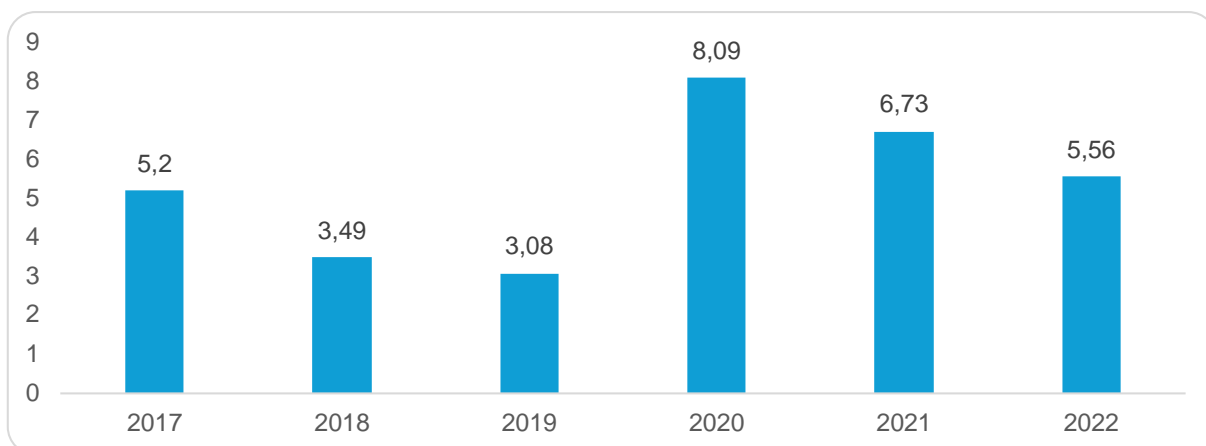
Tahun 2005, angka rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 2,40 tahun. Angka ini meningkat menjadi 3,00 tahun pada tahun 2006 dan tetap stabil hingga tahun 2009. Pada tahun 2010, terjadi sedikit peningkatan menjadi 3,10 tahun. Selanjutnya, peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2011, di mana angka tersebut melonjak ke 6,80 tahun. Peningkatan ini berlanjut secara bertahap hingga mencapai 7,02 tahun pada tahun 2012, kemudian naik lagi menjadi 7,24 tahun pada tahun 2013 dan 7,47 tahun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, angka ini sedikit meningkat menjadi 7,50 tahun, dan terus menunjukkan kenaikan stabil hingga 7,72 tahun pada tahun 2016. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,08 tahun dan terus meningkat perlahan menjadi 8,32 tahun pada tahun 2018. Pertumbuhan ini berlanjut dengan angka 8,55 tahun pada tahun 2019 dan stabil di 8,78 tahun pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah mencapai 9,03 tahun, menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan dalam pendidikan masyarakat Kabupaten Boven Digoel.



Gambar 3. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2010-2022 (Tahun)

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah, 2024)

Tahun 2017, TPT tercatat sebesar 5,2 persen. Angka ini menurun pada tahun 2018 menjadi 3,49 persen dan kembali menurun pada tahun 2019 menjadi 3,08 persen, menunjukkan penurunan tingkat pengangguran selama dua tahun berturut-turut. Namun, pada tahun 2020, TPT mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 8,09 persen, yang merupakan angka tertinggi selama periode ini. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian dan lapangan kerja di daerah tersebut. Setelah puncak pada tahun 2020, TPT mulai menurun menjadi 6,73 persen pada tahun 2021, menunjukkan pemulihan ekonomi yang bertahap. Pada tahun 2022, TPT kembali menurun lebih lanjut menjadi 5,56 persen, mendekati angka yang lebih stabil seperti di tahun-tahun sebelum pandemi. Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam tingkat pengangguran di Kabupaten Boven Digoel, dengan dampak signifikan terlihat pada tahun 2020 akibat pandemi, namun menunjukkan tanda-tanda pemulihan dalam dua tahun berikutnya.



Gambar 4. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2017-2022 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah, 2024)

Tahun 2006, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 29,64 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 29,52 persen pada tahun 2007, dan terus menurun menjadi 27,49 persen pada tahun 2008. Angka ini terus mengalami penurunan hingga 27,01 persen pada tahun 2009 dan 25,79 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin turun lebih lanjut menjadi 25,81 persen, dan secara bertahap terus menurun hingga mencapai 22,79 persen pada tahun 2012 dan 2013. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2014 menjadi 18,87 persen. Dari tahun 2015 hingga 2017, persentase penduduk miskin mengalami sedikit peningkatan, mencapai 19,50 persen pada tahun 2015, 20,82 persen pada tahun 2016, dan 20,35 persen pada tahun 2017. Setelah itu, angka tersebut stabil di sekitar 19-20 persen, dengan 19,90 persen pada tahun 2018, 20,35 persen pada tahun 2019, dan kembali turun menjadi 19,66 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel sedikit meningkat menjadi 19,90 persen. Meskipun ada fluktuasi di beberapa tahun, tren keseluruhan menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2006 hingga 2021.



Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2006-2021 (Persen)
Sumber: BPS Provinsi Papua (diolah, 2024)

B. Isu-Isu Pembangunan Strategis di Kabupaten Boven Digoel

Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi dari informasi yang diberikan, dikelompokkan berdasarkan bidang yang relevan:

1. Aspek Perekonomian Daerah

- Ketergantungan pada Sektor Pertanian: Meskipun pertanian berkontribusi besar terhadap PDRB, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim. Diversifikasi ekonomi menjadi penting.
- Rendahnya Investasi: Realisasi investasi daerah yang fluktuatif dan relatif rendah menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Ketimpangan Pendapatan: Indeks Gini yang berada pada kategori sedang menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi: Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang tinggi dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan biaya proyek, sehingga perlu dicari solusi untuk mengurangi biaya konstruksi.
- Infrastruktur Transportasi Terbatas: Keterbatasan infrastruktur transportasi, terutama jalan dalam kondisi baik, dapat menghambat konektivitas antar wilayah dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlu adanya investasi untuk meningkatkan infrastruktur transportasi.

2. Aspek Kesehatan

- Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak: Meskipun jumlah kelahiran menurun, peningkatan angka kematian ibu dan anak menjadi perhatian serius. Perlu adanya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
- Keterbatasan Fasilitas Kesehatan: Rasio fasilitas kesehatan per penduduk masih rendah, terutama di daerah terpencil. Perlu adanya peningkatan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan yang merata.

- Keterbatasan Tenaga Kesehatan: Rasio tenaga kesehatan per penduduk masih perlu ditingkatkan, terutama dokter spesialis dan tenaga medis lainnya. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah dan distribusi tenaga kesehatan.
- Tingginya Prevalensi Stunting, Underweight, dan Wasting: Masalah gizi pada balita, seperti stunting, underweight, dan wasting, memerlukan penanganan serius melalui intervensi gizi yang tepat dan peningkatan akses ke makanan bergizi.
- Tingginya Kasus Malaria dan Tuberkulosis: Kasus malaria dan tuberkulosis yang tinggi membutuhkan upaya pengendalian dan pencegahan yang lebih intensif, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan obat-obatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan.

3. Aspek Pendidikan

- Rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Jenjang Pendidikan Tertentu: APK yang rendah, terutama pada jenjang SMA, menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi anak usia sekolah dalam pendidikan formal.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sekolah: Meskipun ada peningkatan, ketersediaan sarana dan prasarana sekolah masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil, untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
- Kualifikasi dan Sertifikasi Guru: Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dan yang telah tersertifikasi masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
- Peningkatan Mutu Pendidikan: Selain meningkatkan akses, perlu juga fokus pada peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan peningkatan kompetensi guru.
- Keterbatasan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil: Perlu adanya upaya khusus untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil, termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan transportasi yang terjangkau.

4. Aspek Pembangunan Manusia

- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Meskipun IPM mengalami peningkatan, masih perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Boven Digoel melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.
- Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan: Indeks ketimpangan gender yang masih tinggi menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi diskriminasi gender.
- Peningkatan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi: Meskipun angka melek internet meningkat, masih perlu upaya untuk meningkatkan akses internet yang lebih luas dan merata, terutama di daerah terpencil, untuk mendukung pembangunan manusia di era digital.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas: Perlu adanya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi.
- Peningkatan Kesadaran Lingkungan Hidup: Pembangunan manusia yang berkelanjutan perlu memperhatikan aspek lingkungan hidup. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

5. Aspek Ketenagakerjaan

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang Fluktuatif: Meskipun TPT mengalami tren menurun, fluktuasi menunjukkan perlunya upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- Rendahnya Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih: Perlu adanya peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja terlatih.
- Ketergantungan pada Sektor Informal: Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal yang rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi. Perlu adanya upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor formal dan meningkatkan kualitas pekerjaan di sektor informal.
- Kesenjangan Keterampilan: Perlu adanya identifikasi dan pengembangan program pelatihan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan yang ada di pasar kerja, sehingga tenaga kerja dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks.
- Perlindungan Tenaga Kerja: Perlu adanya penguatan perlindungan tenaga kerja, termasuk penegakan hukum ketenagakerjaan, peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja.

6. Aspek Kemiskinan

- Tingkat Kemiskinan yang Masih Tinggi: Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan masih tinggi. Perlu adanya program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.
- Ketimpangan Pendapatan: Indeks Gini yang berada pada kategori sedang menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan di masyarakat. Perlu adanya kebijakan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.
- Kerentanan Terhadap Guncangan Ekonomi: Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan ekonomi masyarakat terhadap guncangan ekonomi. Perlu adanya program perlindungan sosial yang lebih kuat dan sistem ketahanan ekonomi yang lebih baik.
- Keterbatasan Akses ke Layanan Dasar: Masyarakat miskin seringkali memiliki keterbatasan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan akses ke layanan dasar bagi masyarakat miskin.
- Peningkatan Kapasitas dan Produktivitas Masyarakat Miskin: Perlu adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, termasuk pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

C. Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kinerja Pembangunan di Kabupaten Boven Digoel

Arah kebijakan strategis yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah Boven Digoel di masa mendatang, berdasarkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya:

1. Diversifikasi Ekonomi

- Pengembangan Sektor Pariwisata: Mengidentifikasi dan mempromosikan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah Boven Digoel secara berkelanjutan.
- Pengembangan Industri Pengolahan: Mendorong investasi dan memberikan insentif untuk pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam lokal, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.
- Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian: Mendorong pengembangan produk pertanian olahan dan bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.
- Pengembangan Ekonomi Kreatif: Memfasilitasi pengembangan industri kreatif, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pembiayaan kepada UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka.

2. Peningkatan Investasi

- Memperbaiki Iklim Investasi: Menyederhanakan perizinan usaha, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum untuk menarik investor.
- Promosi Potensi Investasi: Melakukan promosi potensi investasi Boven Digoel secara aktif, baik di dalam maupun luar negeri, dengan menyoroti keunggulan dan peluang investasi di berbagai sektor.
- Pengembangan Infrastruktur Pendukung Investasi: Meningkatkan infrastruktur dasar, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.
- Kemitraan dengan Investor: Membangun kemitraan strategis dengan investor, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendorong investasi dan transfer teknologi.
- Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus: Mempelajari potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor tertentu.

3. Pemerataan Pendapatan

- Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Menyediakan pendidikan dan pelatihan berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja.
- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Memberikan bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
- Program Perlindungan Sosial: Memperkuat program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai, program keluarga harapan, dan jaminan kesehatan, untuk melindungi masyarakat miskin dari guncangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

- Pengembangan Sektor Pertanian yang Inklusif: Mendorong pertanian yang berkelanjutan dan inklusif, yang memberikan manfaat bagi petani kecil dan masyarakat miskin, melalui akses ke lahan, teknologi, dan pasar.
 - Peningkatan Upah Minimum: Menetapkan upah minimum yang layak dan sesuai dengan kebutuhan hidup untuk meningkatkan pendapatan pekerja dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
- 4. Pengurangan Biaya Konstruksi**
- Peningkatan Efisiensi Proyek Konstruksi: Mendorong penggunaan teknologi dan metode konstruksi yang lebih efisien untuk mengurangi biaya dan waktu pembangunan.
 - Pengembangan Industri Bahan Bangunan Lokal: Mendorong pengembangan industri bahan bangunan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan mengurangi biaya transportasi.
 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Konstruksi: Menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
 - Penyederhanaan Regulasi Konstruksi: Menyederhanakan prosedur perizinan dan regulasi terkait konstruksi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pembangunan.
 - Pemantauan dan Evaluasi Proyek Konstruksi: Melakukan pemantauan dan evaluasi proyek konstruksi secara ketat untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas hasil pembangunan.
- 5. Peningkatan Infrastruktur Transportasi**
- Pembangunan dan Peningkatan Jalan: Meningkatkan investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan, terutama jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar.
 - Pengembangan Transportasi Sungai dan Danau: Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas transportasi sungai dan danau untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang di daerah yang sulit dijangkau melalui jalan darat.
 - Peningkatan Kualitas Transportasi Udara: Meningkatkan fasilitas dan layanan bandara untuk meningkatkan konektivitas udara dan mendukung sektor pariwisata.
 - Integrasi Moda Transportasi: Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi, menghubungkan berbagai moda transportasi, untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
 - Pengembangan Transportasi Publik: Mendorong pengembangan transportasi publik yang terjangkau dan berkualitas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.
- 6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**
- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan: Memperluas akses pendidikan berkualitas di semua jenjang, terutama di daerah terpencil, dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan peningkatan kompetensi guru.
 - Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil, melalui peningkatan jumlah dan distribusi fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat-obatan.
 - Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja: Menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif: Mendorong pengembangan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
 - Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Memperkuat program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- 7. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan**
- Program Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran: Mengembangkan program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran, dengan fokus pada peningkatan akses ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi masyarakat miskin.
 - Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin: Memberikan pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan pendampingan usaha kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka.
 - Peningkatan Akses ke Layanan Dasar: Meningkatkan akses masyarakat miskin ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.
 - Pengembangan Pertanian yang Inklusif: Mendorong pertanian yang berkelanjutan dan inklusif, yang memberikan manfaat bagi petani kecil dan masyarakat miskin, melalui akses ke lahan, teknologi, dan pasar.

- Peningkatan Pemerataan Pendapatan: Menerapkan kebijakan fiskal yang progresif, seperti pajak yang lebih tinggi bagi kelompok berpendapatan tinggi dan program bantuan sosial yang lebih besar bagi masyarakat miskin, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan.

8. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

- Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
- Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN): Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan yang efektif dan efisien.
- Kebijakan-kebijakan strategis ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah Boven Digoel dalam merumuskan program-program pembangunan yang lebih terarah dan efektif untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Penting untuk diingat bahwa implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara konsisten, terukur, dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

4. KESIMPULAN

Perkembangan Indikator Pembangunan Daerah di Kabupaten Boven Digoel. Peningkatan PDRB ADHK di Kabupaten Boven Digoel dari 2.193,76 miliar rupiah pada 2010 menjadi 3.218,17 miliar rupiah pada 2022 menunjukkan pertumbuhan ekonomi stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 56,15 persen pada 2010 menjadi 62,52 persen pada 2022, menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia. Angka rata-rata lama sekolah meningkat dari 2,40 tahun pada 2005 menjadi 9,03 tahun pada 2022, mencerminkan peningkatan akses dan partisipasi dalam pendidikan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Boven Digoel cenderung fluktuatif, dengan penurunan signifikan pada periode tertentu namun juga peningkatan pada tahun-tahun lainnya. Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang perlu diperhatikan.

Isu-Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Boven Digoel, antara lain: Ketergantungan pada sektor pertanian, Rendahnya investasi, Ketimpangan pendapatan, Tingginya indeks kemahalan konstruksi, Keterbatasan infrastruktur transportasi, Tingginya angka kematian ibu dan anak, Keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan, Tingginya prevalensi stunting, underweight, dan wasting, Tingginya kasus malaria dan tuberkulosis, Rendahnya APK pada jenjang pendidikan tertentu, Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, Kualifikasi dan sertifikasi guru, Peningkatan mutu pendidikan, Keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil.

Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Kinerja Pembangunan, melalui pengembangan pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif. Meningkatkan investasi dengan memperbaiki iklim bisnis dan pengembangan infrastruktur juga penting. Upaya tambahan meliputi pemerataan pendapatan, pengurangan biaya konstruksi, peningkatan infrastruktur transportasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di Boven Digoel.

5. REFERENCES

- Abdul A.O., Akulov. (2023). (8) Performance Measurement of Regional Strategy Sustainable Development. doi: 10.1007/978-3-031-23856-7_8
- Amir, U. A., & Widyasamratri, H. (2021). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wilayah. *Sustainable, Planning and Culture*, 3(2), 30-34.
- Antonín, Hořčica. (2024). (2) Functional analysis in R: A new approach to sustainability indicators in the context of regional development. *Inproforum*. doi: 10.32725/978-80-7694-053-6.04
- Aos, Kuswandi., Siti, Nuraini., M., H., Alrasyid., Zulfanida, Nurul, Sadiyyah., Yusuf, Adam, Hilman. (2023). (7) The Performance of Regency–City DPRDs In The Formulation of Regional Regulations In Indonesia. *Paradigma (Maracay)*. doi: 10.33558/paradigma.v20i2.7037
- C, Rapetti., Josep, Miquel, Piqué., Henry, Etkowitz., Francesc, Miralles., Jorge, Euclides, Tello, Durán. (2023). (2) Development of Innovation Districts: A Performance Assessment. *Triple Helix*. doi: 10.1163/21971927-bja10040
- Daniele, Vidoni., Kai, Stryczynski. (2023). (1) Driving Performance in the EU Context. doi:

- 10.1093/oxfordhb/9780190059668.013.20
- Dejan, Sabic., Snežana, Vujadinović. (2017). (4) Regional development and regional policy. doi: 10.5937/ZRGFUB1765463V
- Dewi, Sartika. (2019). (1) Urgency of State Administration Innovation System (SINAGARA) on Regional Government Performance. doi: 10.30589/PGR.V3I3.130
- Ewout, W., Steyerberg. (2009). (3) Evaluation of performance. doi: 10.1007/978-0-387-77244-8_15
- Henni, Zainal., Muhammad, Rakib., Andi, Idham, Ashar., Darmawati, Manda., Andi, Tenry, Sose., Ignasius, Setitit. (2020). (5) Strategy of human resources development in improving performance Apparatus in the Bone Regency Regional Inspectorate. doi: 10.26858/PBAR.V2I1.14012
- Hutasuhut, M. A., & Syarvina, W. (2022). The Role of the Regional Development Planning Agency in the Preparation of the Medan City Medium Term Development Plan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 613-620.
- Izzuddin, M., Widayati, Widayati. (2019). (2) Problematics Juridis Facilitation In Regional Development Planning Process (Study of Kendal Regency Research and Development Planning Agency). doi: 10.30659/JDH.2.1.%P
- Kamila, Kamila., Nida, Andina. (2022). (10) Analisis Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Deli Serdang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*. doi: 10.47467/alkharaj.v5i3.1568
- L., Svatošová. (2018). (10) Methodological starting points of regional development analyses. *Agricultural Economics-zemedelska Ekonomika*. doi: 10.17221/5078-AGRICECON
- Musniasih, Yuniati., Baiq, Salkiah., Desi, Suryati., Analisis, Deskriptif., Indikator, Pembangunan, Daerah., Menurut, Kabupaten-Kota., di, Provinsi., Nusa, Tenggara., Barat, Musniasih, Yuniati., Indikator, Pembangunan., Daerah. (2023). (5) Descriptive Analysis of Regional Development Indicators by Regency-City in West Nusa Tenggara Province. doi: 10.55927/ijems.v1i6.7225
- Natalia, V., Bondarenko. (2021). (5) Regional development strategies in the system of state socio-economic regulation. doi: 10.47026/2499-9636-2021-1-13-20
- Ndrey, Vladimirovich, Minakov., N.D., Eriashvili. (2023). (1) Indicators of regional development in the context of economic security of the region. *Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации*. doi: 10.54217/2588-0136.2023.38.4.018
- Revy, Zunitha, Nasution., Erlina., Hasan, Basri, Tarmizi. (2021). (3) The Effect of Local Tax Policy Implementation on Increase in Regional Tax Revenues through Employee Performance Padang Lawas Regency. doi: 10.46729/IJSTM.V2I3.229
- Rolando, Bolaños, Garita. (2014). (4) La evaluación del desarrollo nacional: aproximaciones a partir del esquema de la planificación presupuestaria. *Revista de Ciencias Economicas*. doi: 10.15517/RCE.V32I2.17269
- Rooswandi, Salem., Andi, Tenri, Somp., Samahuddin, Muharram. (2021). (6) Urgency Analysis and Identification of Weaknesses in Implementation of Accountability System Performance of Government Institutions (Sakip) Tanah Bumbu Regency 2015-2021. doi: 10.53622/IJ3PEI.V1I01.5
- Stanislav, Borodin. (2023). (1) A Model for Assessing Regional Sustainable Development Based on the Index Method. *Economy of region*. doi: 10.17059/ekon.reg.2023-1-4
- Titut, Amalia. (2019). (1) Optimization of Reporting Regulations to Measure Regional Development Performance. doi: 10.4108/EAI.10-9-2019.2289436
- Toham, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & Kinseng, R. (2021). Relationship of Participative planning, Planning Alignment and Regional Development Performance: Evidence from Special Region of Yogyakarta. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 1, 49-56.
- Ugo, Fratesi. (2023). (2) Regional Policy. doi: 10.4324/9781351107617
- Wulandari, Harjanti., Ujianto., Akhmad, Riduwan. (2020). (9) The Urgency of Gresik Wooven Sarong as Local Wisdom Research. *International Journal of scientific research and management*. doi: 10.18535/IJSRM/V8I03.EM04
- Yeon-Jung, Joo., Yooshik, Yoon., Kwang-Seok, Jeong. (2022). (3) Development of Performance Evaluation Indicators on MICE Integrated District using the Delphi method. *Journal of MICE & Tourism Research*. doi: 10.35176/jmtr.22.2.6
- Yevhen, Vasylovych, Mishenin., Inna, Koblianska., Viktoriia, Medvid., Yuliia, Maistrenko. (2018). (5) Sustainable regional development policy formation: role of industrial ecology and logistics. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*. doi: 10.9770/JESI.2018.6.1(20)
- Zulfiya, M., Abdulaeva., Raisa, Sh., Datsaeva., Larisa, A., Djamoldinova., Luiza, A., Elgukaeva. (2019). (7) Assessment of development performance and investment climate of a region.
- Vidoni, D., & Stryczynski, K. (2023). Driving Performance in the EU Context. *The Oxford Handbook of Program Design and Implementation Evaluation*, 429.

- Fratesi, U. (2023). *Regional policy: theory and practice*. Taylor & Francis.
- Šabić, D., & Vujadinović, S. (2017). Regional development and regional policy. *Zbornik radova-Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu*, (65-1a), 463-477.
- Nasution, R. Z. (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Melalui Kinerja Pegawai Kabupaten Padang Lawas* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Mishenin, Y., Koblianska, I., Medvid, V., & Maistrenko, Y. (2018). Sustainable regional development policy formation: role of industrial ecology and logistics.
- Borodin, A., Panaedova, G., Ilyina, I., Harputlu, M., & Kiseleva, N. (2023). Overview of the Russian Oil and Petroleum Products Market in Crisis Conditions: Economic Aspects, Technology and Problems. *Energies*, 16(4), 1614.
- syani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT Bumi Aksara.
- Bloom, N., & Reenen, J. V. (2010). *Human Resource Management and Productivity*. <https://worldmanagementsurvey.org/wp-content/images/2010/07/Human-Resource-Management-and-Productivity-Bloom-and-Van-Reenen.pdf>
- Fisabilillah, L. W. ., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal of Economics, Entrepreneurship, and Innovation*, 1(3), 154-159. <https://doi.org/10.31960/ijoei.v1i3.866>
- Fuadi, D. S., Akhyadi, A. S., & Saripah, I. (2021). Systematic Review: Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Ekonomi Digital Melalui Aksi Sosial. *Diklus:Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21831/diklus.v5i1.37122>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. H. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/9974/9070>
- Husein, U. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Rajawali.
- Ip, Y. ., & Koo, L. . (2004). BSQ Strategic Formulation Framework: A Hybrid Of Balanced Scorecard, SWOT Analysis And Quality Function Deployment. *Managerial Auditing Journal*, 19(4), 533-543. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/02686900410530538>
- Kekry, B. P. N., & Iriawan, I. (2024). Difficulties in Realizing Regional Finance in Indonesia: Quantitative Descriptive Approach. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(1), 29-44. <https://doi.org/https://doi.org/10.36574/jpp.v8i1.527>
- Komaruddin. (1991). *Uang Di Negara Sedang Berkembang*. Bumi Aksara.
- Kuncoro. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Erlangga.
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Cet. 1). RMBooks.
- Maharani, S. D., Wardani, A. A., Fachira, A. A., & Muljanto, M. A. (2024). Peran Penguatan Oleh Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan Umkm Di Desa Banjarsari Kabupaten Probolinggo. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(2), 533-547. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v11i2.2024.533-547>
- Mahmud, M. I. (2014). Alat Tukar Lokal Dan Impor Di Papua. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi: AMERTA*, 32(2), 77-154. <https://ejournal.brin.go.id/amerta/article/view/3226/2227>
- Moleong, L. (2021). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, M. E. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media.
- Rangkuti, F. (2014). *ANALISIS SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ridha, F. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa. *Jurnal Ekonomi Islam: Jurnal At-Tawassuth*, 4(2), 252-276. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287-295. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Saefudin, & Hotmaidah. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dan Strategi Pemasaran Pada Umkm Di Desa Curug Kelurahan Curug Kota Serang. *Dasabhakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25-28. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/dasabhakti.v3i1.8084>
- Sari, S. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Collaborative Governance di Desa Pananrang Kecamatan Mattiro Bulu. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 16-29. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/banco.v6i1.7536>
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujaningsih, N. L. G., & Budiasih, Y. (2024). Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa dalam Lingkaran Adat Desa Sanur Kaja. *Karunia: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 1-6. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/karunia.v3i1.1976>

- Suriasumantri, J. . (1993). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* (7th ed.). Pustaka Sinar Harapan.
- Suroto, H. (2009). Fungsi Kulit Kerang (*Cypraea Moneta*) Dalam Perdagangan di Pegunungan Tinggi Papua. *Kapata Arkeologi*, 5(9), 96–102. <https://kapata-arkeologi.kemdikbud.go.id/index.php/kapata/article/view/122>
- Tolla, M. (2010). Alat Tukar di Papua dan Komoditasnya. *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat*, 2(1), 55–66. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1644044>
- Walpole, R. ., Myers, R. ., Myers, S. ., & Ye, K. (1993). *Probability And Statistics For Engineers And Scientists* (pp. 326–332). Macmillan.